

Pemko Diminta Buat Langkah Antisipasi

Jika Target BPHTB Tak Tercapai

BATAM KOTA (BP) - Target pendapatan daerah dari Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun ini diperkirakan tidak akan mancapai target, meski pelayanan perizinan terkait lahan dan properti sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

Meneropong kemungkinan tersebut, sejumlah anggota DPRD Batam meminta Pemerintah Kota Batam agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil lebih memaksimalkan kinerjanya. Selain itu, Pemko Batam juga diminta menyiapkan alternatif solusi jika target tak sesuai harapan.

"Bisa dengan memaksimalkan sumber pendapatan lain sehingga bisa menutupi yang tak mencapai target," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam Sallon Simatupang, Rabu (11/4).

Menurut dia, memasuki tri-

wulan kedua 2018 ini, realisasi pajak BPHTB baru di angka Rp 65,9 miliar dari target Rp 380 miliar. Jumlah itu baru sekitar 17 persen dari target.

"BPHTB itu andalan Kota Batam. Makanya ketika tidak tercapai, imbasnya sangat besar. Idealnya memang sudah harus 20-25 persen dari target tersebut," jelas Sallon.

Jika target tak tercapai, pembangunan sejumlah proyek yang sudah direncanakan bisa terganggu. Begitu juga dengan bantuan sosial pada masyarakat akan tertunda.

"Pemko Batam saya pikir sudah harus mulai mengantisipasi ini," tutur dia.

Terkait penyebab mandeknya sektor BPHTB, Sallon menuding tak lepas dari belum normalnya Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal lain disebabkan kondisi ekonomi Batam

yang belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, jual beli rumah masih sangat rendah.

"Faktor global ini berpengaruh terhadap stagnannya jual beli rumah," paparnya.

Terlebih lagi, tingginya angka pengangguran. Karena, salah satu konsumen yang membeli rumah adalah karyawan. "Bagaimana dia mau beli rumah kalau tak bekerja. Bagaimana pula mau beli ruko kalau geliat ekonomi masih lemah," ucap dia.

"Untuk itulah dua hal ini harus disikapi dari sekarang. Pemko dan BP Batam harus duduk bersama," jelasnya.

Tudingan senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Batam, Mesrawati Tambubolon. Menurut dia, tidak tercapainya target BPHTB tidak lepas dari peran BP Batam. "Jika BP Batam tidak siap, bagaimana menyelesaikan BPHTB," katanya. (rng)

NO	TANGGAL	NAMA KECAMATAN	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1.	02 APR - 07 APR 2018	KEPRI MALL	TOP 100 BENGKONG	01 APR 2018 - MINGGU
2.	09 APR - 13 APR 2018	MC. DONALD BOONH	TIBAN CENTER	08 APR 2018 - HARI MINGGU 14 APR 2018 - ISRA-MULYATI
3.	16 APR - 21 APR 2018	NAGOYA MALL	GIANT BENGKONG	15 APR 2018 - MINGGU
4.	23 APR - 30 APR 2018	HOTEL UTAMA	BOTANIA	22 & 29 APR 2018 - MINGGU

JADWAL SAMSAT BERGERAK

NO	TANGGAL	NAMA KECAMATAN	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1	02 APR - 07 APR 2018	SEKUPANG	SENIN - JUMAT 09.00 - 15.00 WIB ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WIB	01 APRIL 2018 - MINGGU
2	09 APR - 13 APR 2018	BENGKONG	SENIN - JUMAT 09.00 - 15.00 WIB ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WIB	08 APRIL 2018 - MINGGU 14 APR 2018 - ISRA-MULYATI
3	16 APR - 21 APR 2018	SEI. BEDUK	SENIN - JUMAT 09.00 - 15.00 WIB ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WIB	15 APRIL 2018 - MINGGU
4	23 APR - 30 APR 2018	NONGSA	SENIN - JUMAT 09.00 - 15.00 WIB ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WIB	22 & 29 APRIL 2018 - MINGGU

JADWAL SAMSAT ANTAR PULAU

HAJI / TANGGAL	SAMBAT ANTAR PULAU	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
SETIAP RABU (TGL 07, 14, 21, DAN 28 MARET 2018)	DEKANG PADANG (KANTOR KELURAHAN TANRING DAR)	RABU 09.00 - 14.30 WIB ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WIB	

TERAS

Pengambilan e-KTP Tak Bisa Diwakilkan

BENGKONG (BP) - Kecamatan Bengkong akhirnya mendapat giliran pendistribusian Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam. Sebanyak 9.800 keping e-KTP milik warga yang merekam sejak 2016 hingga Februari 2018 sudah bisa diambil di Kantor Camat Bengkong. Kemarin (11/4), puluhan warga tampak mengantre pengambilan e-KTP.

MENTERI RINI PUJI MPP BATAM



BATAM KOTA (BP) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam sangat bagus. Apalagi, Batam sangat berbeda dengan tempat lain, ada Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Tapi melalui MPP ini dapat menyatukan semua persoalan investor sehingga bisa terselesaikan dengan baik.

"MPP ini sangat bagus, Batam jauh lebih bagus lagi MPP-nya. Saya senang dibawa ke sini dan program ini juga didukung oleh Kejaksaan Agung," ujar Rini dalam kunjungan kerjanya ke Kota Batam, Rabu (11/4).

Rini datang berkunjung ke Batam bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur dan Kejaksaan Agung HM Prasetyo. Rombongan disambut oleh Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun, Wali Kota Batam

MPP ini sangat bagus, Batam jauh lebih bagus lagi MPP-nya. Saya senang dibawa kesini dan program ini juga didukung oleh Kejaksaan Agung."

RINI SOEMARNO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan Ketua BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

Di MPP rombongan berkeliling melihat pelayanan yang ada di masing-masing konter pelayanan perizinan. Dimulai dari konter Kejaksaan, melihat pelayanan e-tilang. Para menteri berdialog dengan petugas yang bertugas memberikan

Menteri Rini Puji MPP Batam

Sambungan dari hal 9

pelayanan *e-tilang*. Bagaimana proses pengurusan bagi masyarakat yang kena tilang dan prosedur penyelesaiannya? Di kounter layanan mandiri, rombongan melihat masyarakat yang meng-*upload* dokumen untuk mengurus perizinan.

Sambil bersenda gurau Rini bersama rombongan lainnya berkomunikasi dengan masyarakat. Dilanjutkan meninjau kounter layanan BNI, ATB, dan balai nikah yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam.

Rini juga mempertanyakan proses pengurusan perizinan apabila investor ingin berinvestasi di bidang hotel. Verbiyan, petugas di MPP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menjelaskan bahwa yang utama ditanyakan kepada investor adalah terkait lahan.

Kata Verbiyan, apabila calon investor belum mempunyai lahan, maka akan diarahkan ke BP Batam. Apabila lahan sudah tersedia dan seluruh persyaratan sudah dipenuhi dan calon investor membutuhkan kontraktor untuk mengerjakan pembangunan,

maka akan diarahkan ke Kadin untuk mendapatkan kontraktor.

"Ini program presiden yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Penekanan paling utama bahwa perizinan sudah betul-betul nontunai dan transparan. Dari perbankan mendukung penuh program ini," sebut Rini.

Menpan-RB Asman Abnur mengatakan, sejak 2017 lalu kementerian mencoba mengintegrasikan perizinan dari tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kata Asman, ada empat daerah yang menjadi percontohan DKI, Surabaya, Bali, dan Banyuwangi.

"Respons datangnya dari Batam dan di-*support* oleh gubernur. Sehingga gedung yang tadinya tidak ada apa-apa disulap seperti saat ini," kata Asman memuji MPP Batam.

Saat ini, MPP sudah menjadi viral dan sudah ada 19 kota yang antre untuk mendirikan MPP. Ke depan pelayanan perizinan terselesaikan tidak lagi hitungan hari melainkan hitungan jam. Diharapkan dengan cepatnya proses perizinan investasi bisa tumbuh. Pelayanan perizinan juga sudah transparan dengan adanya MPP karena tidak ada sentuhan antara pengurus

dengan otoritas. "Dengan adanya program ini bisa menjadi model di Indonesia," sebutnya.

Kejaksanaan Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa MPP Kota Batam ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kehadiran MPP karena pemerintah ingin meningkatkan pelayanan dan transparansi. Melalui pelayanan ini diharapkan tidak ada lagi terjadi penyimpangan dan mempermudah tugas aparat hukum.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Batam Gustian Riau mengatakan gedung MPP akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dijadwalkan April ini. "Sesuai dengan pernyataan Pak Menpan-RB bahwa ini (MPP) akan diresmikan Pak Presiden. Tinggal menunggu jadwal dari Pak Presiden," ungkapnya.

Persiapan untuk peresmian sudah dilakukan Pemko Batam selaku pengelola. Bahkan, kunjungan Menteri BUMN, Menpan-RB, dan Jaksa Agung juga untuk melihat kesiapan dari semua lembaga dan instansi yang ada di MPP. "Kita berharap memang semua perizinan ini dipersingkat. Dari bapak dan ibu menteri tadi meminta kalau selama ini perizinan hitungan hari, maka seharusnya setelah ini harus

hitungan jam. Dan yang hitungan minggu, seharusnya menjadi hitungan hari," jelasnya.

Semua perizinan juga harus *online*. "Kalau kami di DPM-PTSP misalnya untuk SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sudah hitungan jam dan memang tidak ada masalah lah," ungkapnya.

Gustian menyebutkan, di MPP sudah ada sekitar 30 lembaga dan instansi yang bergabung dengan jumlah perizinan mencapai 427 perizinan. Ia berharap dengan kemudahan ini, investasi di Batam akan meningkat.

19 Kota Antre Bangun MPP

Menpan-RB Asman Abnur menyebutkan bahwa saat ini terdapat 19 kota antre untuk mendirikan MPP. Sebab, pelayanan perizinan yang terintegrasi dalam satu tempat ini diharapkan dapat mendorong *Ease of Doing Business Indonesia* (EODB) atau kemudahan berinvestasi. Saat ini, peringkat Indonesia dalam kemudahan berinvestasi naik dari peringkat 71 menjadi peringkat 40.

"Pak Presiden ingin kita dibawah 40, Menko Perekonomian target 40. Ini yang terus kita kejar," kata Asman. (mta/ian/adi)

Pengambilan e-KTP Tak Bisa Diwakilkan

Sambungan dari hal 9

Mereka yang diwajibkan membawa surat keterangan (Suket) perekaman. Surat itu kemudian diajukan ke meja petugas yang masing-masing sudah dibagi per kelurahan.

Camat Bengkong M Tahir mengatakan, proses pengambilan e-KTP sudah mulai sejak Senin (9/4) lalu. Belasan petugas disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan warga yang akan mengambil e-KTP. "Karena di Bengkong ada 4 kelurahan, pembagian pun kami bagi menurut kelurahan. Masing-masing kelurahan kami siapkan tiga petugas," terang Tahir kepada *Batam Pos*, kemarin.

Hasil perekaman e-KTP harus diambil langsung oleh warga bersangkutan atau sesuai identitas. Kecuali, ada surat kuasa dari pemilik identitas kepada keluarga yang juga termasuk dalam kartu keluarga (KK).

"e-KTP-nya harus diambil sendiri, tak bisa diwakilkan. Untuk menghindari penyalahgunaan dan 'orang-orang yang bermain'. Apalagi ini tahun politik," ungkap Tahir.

Memurut dia, dari Disdukcapinya mendistribusikan 9.800 e-KTP yang telah merekam sejak 2016 hingga Februari 2018. Namun, yang didistribusikan ke warga 12.800. "Sebelumnya masih ada sisa 3.000 e-KTP yang cetak reguler. Kami bagikan bersamaan 9.800 e-KTP yang baru didapat," terangnya.

Dijelaskan Tahir, sebenarnya sekitar 10 ribu e-KTP yang didistribusikan dari Disduk. Namun



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

SEORANG warga melakukan perekaman e-KTP di Kecamatan Bengkong, Selasa (10/4).

200 data warga *failed*, sehingga data harus diulang. "Ada 200 data yang *failed*. Nah, kami tengah menunggu pemilik data *failed* itu untuk diulang pengambilan data," jelas Tahir.

Ribuan e-KTP Belum Diambil

Batam kini sedang mengejar target penyelesaian kepemilikan e-KTP. Sejauh ini, Batam selalu lancar mendapat pa-

sokan blangko e-KTP. Namun sayang, ribuan keping e-KTP yang sudah tercetak belum diambil pemiliknya.

"Saya sudah turun di empat kecamatan. Ada yang belum ambil (e-KTP), satu kecamatan 6 ribu, satu lagi ada 4 ribu," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Mal Pelayanan Publik, kemarin.

Ia mengaku mempersiapkan dokumen kependudukan

tersebut mendapat atensi dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi. "Memang ada warga belum ambil, padahal sudah tercetak. Soal e-KTP ini memang sudah arahan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, persoalan e-KTP sudah harus terurai pada Mei mendatang. Namun, sambungannya, harapannya ini juga harus didukung ketersediaan blangko dari Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, kata dia, Batam menerima 16 ribu keping blangko. Jumlah tersebut diplot untuk Kecamatan Lubukbaja dan Seibeduk. "Mei sudah harus clear semua, kami terus berpacu menyelesaikan persoalan ini," terang Rudi.

Sementara itu, Disdukcapil Kota Batam menyambut target dari Wali Kota tersebut. "Sesuai arahan Pak Wali Kota, tumpukan yang ada sekarang diharapkan bisa terselesaikan," kata Kepala Disdukcapil Kota Batam Said Khaidar, Kamis (3/1) lalu. (she/adi)

TANGKI AIR KUALITAS PREMIUM

★ 100% PLASTIK MURNI (POLYETHYLENE)

★ ANTI SINAR UV

★ LEBIH TEBAL

★ TUTUP TANGKI KOKOH

★ MEMILIKI LAPISAN PUTIH SUPER YANG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN JAMUR

BONUS

PELAMPUK OTOMATIS KHUSUS TANGKI MERK JERAPAH Untuk tipe T6 55 ke atas



TERSEDIA DI TOKO - TO